

PENGUATAN SEKTOR LOGISTIK DALAM DISTRIBUSI DAN PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SURAKARTA

Johan Bhimo Sukoco

Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik,
Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro
johanbhimo@lecturer.undip.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seringkali terkendala dalam distribusi dan pemasaran. Hal ini tidak dapat terlepas dari sektor logistik yang idealnya harus bersinergi dengan UMKM dalam pengembangan jejaring. Data *Logistic Performance Index* (LPI) 2018 yang dikeluarkan Bank Dunia menunjukkan posisi Indonesia di peringkat ke-46, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, biaya logistik di Indonesia masih terlampau tinggi, mencapai 23,5 % pada tahun 2017 lalu. Penelitian ini fokus mengkaji sejauhmana penguatan sektor logistik dilakukan dalam rangka penguatan distribusi dan pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi non partisipan, dan analisis dokumen. Model analisis interaktif digunakan sebagai teknik analisis data. Validitas data menggunakan triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan sektor logistik di Kota Surakarta belum optimal dalam mendukung pengembangan UMKM di Kota Surakarta. Sektor logistik belum bersinergi dengan baik dengan sektor perekonomian UMKM. Ironisnya, dari sebanyak 43.804 UMKM, hanya sebanyak 2.978 usaha saja yang sudah menjadi UMKM Binaan pemerintah setempat. Jadi, masih ada sekitar 93 % UMKM yang belum tersentuh pendampingan pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pendampingan terkait logistik, distribusi dan pemasaran.

Kata Kunci : logistik, UMKM, distribusi, pemasaran

PENDAHULUAN

Sektor perekonomian mikro, utamanya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat berkontribusi tinggi dalam perekonomian nasional. Potensi pengembangan UMKM yang besar ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian rakyat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pada Pasal 1, mendefinisikan usaha kecil ialah usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar.

Sethuraman (Sriyana, 2010), menyitir kajian *International Labour Organization* (ILO), yang menyebutkan bahwa aktivitas-aktivitas dalam UMKM bukan hanya terbatas pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, melainkan dapat meliputi pula aktivitas perekonomian yang ditandai dengan mudah untuk dimasukinya, bersandar pada sumber daya lokal, kepemilikan usaha sendiri, operasionalnya dalam skala kecil, padat karya, dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan

dapat diperoleh dari luar system pendidikan formal, tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Munizu (2013), menuliskan bahwa sebagai salah satu komponen dalam industri nasional, UMKM memiliki peranan yang penting dalam perekonomian nasional, pemerataan distribusi hasil pembangunan, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulangan kemiskinan.

Namun demikian, sayangnya sektor UMKM ini masih terkendala dalam distribusi dan pemasarannya. Pengembangan jejaring produk UMKM belum bersinergi baik dengan sektor logistik. Berdasarkan data *Logistic Performance Index* (LPI) tahun 2018 lalu yang dikeluarkan Bank Dunia, menunjukkan bahwa posisi Indonesia berada di peringkat ke-46. Angka ini sebenarnya meningkat dari tahun sebelumnya, namun kenyataannya biaya logistik di Indonesia masih terlampau tinggi, dimana mencapai 23,5 % pada tahun 2017 lalu.

Penelitian ini fokus mengkaji sejauhmana penguatan sektor logistik dilakukan dalam rangka penguatan distribusi dan pemasaran. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta. Sektor UMKM di Kota Surakarta diindikasikan belum optimal dalam bersinergi dengan sektor logistik.

LANDASAN TEORI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Regulasi ini dengan jelas mendefinisikan Usaha Mikro sebagai usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha perorangan.

Lebih lanjut, Usaha Kecil ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dimana dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian dari usaha menengah maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan.

Usaha Menengah, ialah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Fajar (2006), menuliskan bahwa terdapat 2 (dua) alasan mengapa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu mendapat perlindungan dari pemerintah, yaitu : *Pertama*, kuantitas pengusaha

UMKM di Indonesia yang besar. *Kedua*, adanya berbagai kelemahan dalam pembinaan UMKM ketika masuk dalam system persaingan pasar bebas, dimana hal ini menjadi ancaman dari keberlanjutan UMKM tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah kurang memberikan kebijakan proteksi atau perlindungan terhadap masuknya produk-produk dari internasionalisasi dari negara maju. Padahal, secara kualitas produk, produk UMKM dalam negeri tidak kalah berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dari pemerintah.

Penelitian-penelitian terdahulu terkait pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dilakukan peneliti lain. Ariani dan Utomo (2017), melalui penelitiannya berjudul *Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan*, menemukan fakta bahwa UMKM di Kota Tarakan perlu ditingkatkan melalui strategi *Growth* (pertumbuhan), kualitas bahan baku, legalitas/ijin produk yang masuk kualifikasi, harga yang bersaing dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Trisnojuwono, dkk (2017), melalui risetnya berjudul *Analisis Strategi Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Dana Bergulir pada Lembaga Pengelola Dana Bergulir*, menyebutkan bahwa strategi yang perlu dikembangkan ialah memerhitungkan peningkatan efektivitas penyaluran pinjaman atau

pembiayaan, yang meliputi saluran pinjaman atau pembiayaan dan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap sukses pengembalian.

Ananda dan Susilowati melalui penelitiannya berjudul *Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang*, menemukan fakta bahwa permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan, infrastruktur, teknologi, dan pemasaran perlu disinergikan untuk bekerjasama antara semua sektor industri kreatif baik dengan pemerintah maupun swasta.

Lebih lanjut, Darwin (2017), melalui risetnya berjudul *UMKM dalam Perspektif Pembiayaan Inklusif di Indonesia*, menyebutkan bahwa diperlukan prioritas kebijakan khusus terkait aksesibilitas dalam pembiayaan untuk mendukung keberlangsungan UMKM.

Greenbak (2001), menuliskan bahwa pelaku UMKM seringkali memiliki kecenderungan yang minim dalam meningkatkan keuntungan dan mengejar laba. Lebih lanjut, Daroin (2014), menuliskan bahwa strategi yang paling strategis dalam pengembangan UMKM ialah inovasi, pameran, dan pemasaran melalui online.

Devins, dkk (2005), menuliskan bahwa diperlukan pendekatan intervensi dalam hubungan antara manajer mikro dan agen dalam keberhasilan perancangan

usaha. Hidayat (2013), menuliskan pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan optimalisasi dalam peningkatan kapasitas, permodalan, dan fasilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan penguatan sektor logistik dalam rangka penguatan distribusi dan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlokus di Kota Surakarta. Penelitian dilakukan dari bulan Juli 2018 lalu sampai dengan Agustus 2019 lalu.

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian ini ialah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, dimana dijadikan informan kunci (*key informan*) dalam penelitian ini.

Prosedur

Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, yang dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data, yaitu : wawancara tidak terstruktur, observasi berperan serta, dan studi dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian diolah, dan

dikaji validitasnya menggunakan validitas metode, yaitu dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data. Data kemudian disajikan dalam bentuk laporan ilmiah, dimana dianalisis menggunakan analisis interaktif.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur, observasi berperan serta, dan studi dokumen. Wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplor jawaban dari informan. Lebih lanjut, observasi berperan serta dilakukan peneliti bersamaan dengan pengambilan data lapangan. Di sisi lain, studi dokumen dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penguatan sektor logistik dalam rangka penguatan distribusi dan pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data melalui analisis interaktif menurut Milles and Hubberman. Analisis interaktif ini dilakukan dengan memperhatikan 3 (tiga) komponen pokok, yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta perlu dilakukan melalui pembinaan dalam pemasaran dan distribusi logistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing masyarakat di Jawa Tengah, sesuai jargon Menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan studi dokumen, yakni dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menyebutkan terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan program UMKM, sebagai berikut : (1) Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; (2) Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; (3) Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (4) Peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan, (5) Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

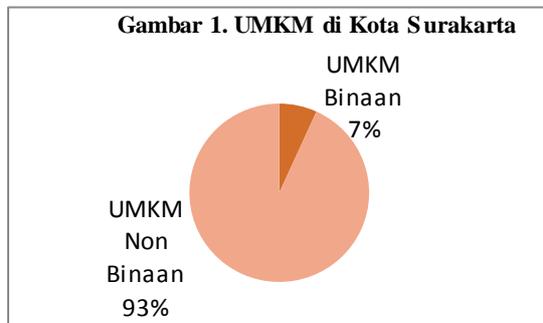
Adapun program pengembangan sektor UMKM ini memiliki beberapa tujuan, antara lain : (1) Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; (2) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (3) Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Beberapa regulasi pendukung dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kota Surakarta yang dipilih sebagai lokus dalam penelitian ini memiliki kuantitas UMKM sebanyak 43.804 unit. Adapun kuantitas ini terdiri dari 41.512 usaha berskala mikro, 2.197 usaha berskala kecil, dan 95 usaha berskala menengah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan dari sejumlah 43.804 UMKM ini, hanya sebanyak 2.978 usaha saja yang sudah menjadi UMKM Binaan pemerintah setempat. Jadi, masih terdapat sekitar 40.826 UMKM yang belum mendapat sentuhan pendampingan pemerintah.

Berikut ini dapat dilihat dalam Gambar 1. terkait sebaran UMKM di Kota Surakarta:



Sumber : diolah dari data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta, 2018

Beranjak dari Gambar I.1 tersebut maka dapat dilihat bahwa masih terdapat 93 % UMKM di Kota Surakarta yang belum tersentuh pendampingan oleh pemerintah. Kondisi ini idealnya perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah, mengingat potensi yang sangat besar dalam pengembangan UMKM tersebut.

Berdasarkan Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta Tahun 2017 lalu jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor UMKM ini sebesar 13.217 orang. Adapun kuantitas ini terdiri dari 6.004 tenaga kerja berjenis kelamin perempuan, dan sebanyak 7.213 tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki.

Hasil kajian yang dilakukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kota Surakarta menunjukkan UMKM di Kota Surakarta terkendala permasalahan pemasaran. Hasil riset menunjukkan masih banyaknya ritel-ritel modern yang belum bersedia menerima produk-produk UMKM.

Lebih lanjut, ritel-ritel modern ini mempersyaratkan perijinan produk, dimana hal ini seringkali sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki ijin usaha maupun ijin produk, sehingga produknya tidak dapat diterima dengan baik oleh ritel-ritel modern.

Permasalahan perijinan ini menjadi masalah yang sangat penting untuk dicarikan solusi dalam pengembangan UMKM. Hasil riset juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa keuntungan jika pelaku UMKM melakukan pengurusan perijinan usaha maupun perijinan produk. Salah satunya ialah mempermudah dalam prosedur pemberian skim bantuan dari pemerintah setempat. Selain itu, tentu saja dengan pengurusan perijinan yang baik tentu dapat mempermudah pelaku UMKM untuk menembus pasar-pasar ritel modern.

Hasil riset menunjukkan masih banyak pelaku UMKM di Kota Surakarta yang belum melakukan perijinan usaha. Hal ini sangat melemahkan dalam distribusi maupun pemasaran produk. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelaku UMKM masih belum tereduksi dengan

baik terkait prosedur pengurusan perijinan usaha. Hal ini yang membuat pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan usaha.

Prosedur perijinan yang lama dan panjang membuat pelaku UMKM enggan melakukan pengurusan izin ini. Hal ini membuat data terkait kuantitas pelaku UMKM kurang tersedia dengan baik. Selama ini, data yang dikeluarkan pemerintah terkait kuantitas UMKM selalu berbeda, dikarenakan masih banyak UMKM yang belum melakukan perizinan, mengingat data perizinan ini diperlukan dalam pendataan UMKM.

Beberapa UMKM yang belum melakukan perizinan usaha ini seringkali ada di skala non formal, mengingat usaha non formal ini tidak terikat oleh persyaratan perizinan usaha yang terlalu mengikat. Padahal, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat sekitar 48.582 unit usaha berskala non formal di UMKM yang ada di Kota Surakarta. Berikut ini data UMKM berskala formal dan non formal yang ada di Kota Surakarta :

Tabel 1.
Data Skala Formal dan Non Formal
UMKM di Kota Surakarta

Skala	Jumlah UMKM
(1)	(2)
Formal	6.075

Non Formal	48.582
Jumlah	54.582

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta 2018

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan UMKM yang dilakukan pemerintah setempat telah dilakukan salah satunya dengan menganggarkan bantuan permodalan melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Hasil riset menunjukkan pada tahun 2002 sampai dengan 2006 lalu pemerintah sangat deras menggelontorkan dana bantuan permodalan untuk penguatan UMKM.

Pada tahun 2002 lalu, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang secara fluktuatif naik hingga pada tahun 2006 sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Di sisi lain, jumlah penerima modal bantuan untuk UMKM ini juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2002, misalnya, terdapat sebanyak 40 UMKM yang menerima bantuan permodalan dari pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kuantitas tersebut sangat meningkat tajam pada tahun 2006 lalu, dimana terdapat sebanyak 151 UMKM yang memperoleh bantuan permodalan.

Berikut ini dapat dilihat dalam Tabel 2 yang menunjukkan jumlah bantuan

APBD untuk penguatan UMKM di Kota Surakarta dari tahun 2002 sampai dengan 2008 :

Tabel 2.
Bantuan APBD untuk Penguatan
UMKM di Kota Surakarta

Tahun	Dana	Kuantitas UMKM Penerima Bantuan Modal
(1)	(2)	(3)
2002	300.000.000	40
2003	390.000.000	52
2004	413.691.000	60
2006	950.000.000	151
2007	300.000.000	79
2008	450.000.000	91

Sumber : Data Primer dan Sekunder.

Tabel 2 tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat penurunan nominal bantuan yang diberikan pemerintah dalam rangka penguatan UMKM, dari tahun 2002 sampai dengan 2006 lalu. Hal ini terlihat pada tahun 2006 dimana bantuan permodalan yang diberikan pemerintah sebesar Rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian menurun drastis pada tahun 2007 menjadi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Meskipun pada tahun 2008 naik lagi angkanya, namun

nominal tersebut tidak mencapai setengah dari nominal tahun 2006 lalu. Hal ini menunjukkan pemerintah belum terlalu serius menggarap sektor UMKM. Pemerintah belum konsisten dalam memberikan bantuan pemodalannya yang merupakan pondasi dasar dalam sebuah usaha di sektor UMKM.

Penguatan UMKM ini juga melibatkan berbagai pihak industri sektor logistik. PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mulai memiliki ketertarikan bersinergi dengan UMKM di Jawa Tengah dalam menyediakan jasa layanan logistik untuk mendistribusikan produk-produk ekonomi kreatif dari UMKM.

Hasil studi literasi yang dilakukan peneliti seperti yang dikutip dari Solopos.com, Mayland Hendar Prasetyo, yang merupakan *Head of Marketing Communication* JNE, menyebutkan bahwa : “JNE dan UMKM adalah mitra, sehingga JNE *concern* dalam memberikan dukungan dengan semangat tagline *Connecting Happiness*.”

Lebih lanjut, Kepala Cabang Utama JNE di Kota Surakarta, Bambang Widiatmoko, menyebutkan bahwa pengembangan JNE untuk pelayanan UMKM sangat bermanfaat dalam menjalankan bisnis online, dimana salah satunya ialah penggunaan aplikasi mobile *apps MyJNE*. Aplikasi ini sangat penting dalam mengetahui estimasi waktu serta status pengiriman barang secara detail

maupun informasi lokasi titik pelayanan terdekat.

Selain itu, JNE juga mengembangkan PESONA (Pesanan Oleh-Oleh Nusantara), dimana bekerja sama dengan lebih dari 600 produsen makanan khas daerah. Oleh-oleh ini dapat dipesan melalui *mobile apps* Pesona Nusantara Online.

Untuk pengembangan produk UMKM, JNE juga menyediakan layanan *JNE International Shipment*, sehingga pelanggan dapat mengirim paket ke lebih dari 250 negara. Lebih lanjut, JNE mengembangkan JTR (*JNE Trucking*) dimana saat ini beroperasi untuk wilayah Jawa, Sumatera hingga Bali, dimana bertujuan untuk membantu distribusi paket berukuran besar serta tidak terkendala aturan penerbangan. Hal ini seperti dikutip oleh *elogistik.id*.

Untuk mendukung sektor UMKM, JNE juga mengembangkan *Friendly Logistic*. Berbagai fasilitas pengelolaan gudang (*warehouse management*), seperti digital marketing, proses pemenuhan persanan, pengembangan teknologi, manajemen pengiriman, serta pengantaran paket ke konsumen disediakan melalui *Friendly Logistic* ini Layanan *E-fulfillment* ini merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya (Tribunnews, 2019).

Hal ini menunjukkan sektor logistik, utamanya perusahaan jasa ekspedisi barang,

sudah mulai menunjukkan minatnya dalam mengoptimalkan kinerja dengan bekerja sama dengan sektor UMKM. Kondisi ini terlihat dari PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), yang mulai menunjukkan berbagai program yang ditujukan dalam pengembangan kerja sama dengan sektor UMKM, semisal Program *MyJNE*, PESONA, *JNE International Shipment*, *JNE Trucking*, *Friendly Logistic*, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan pemerintah setempat belum memiliki regulasi khusus yang mengatur terkait kerja sama antara beberapa perusahaan ekspedisi dengan pelaku UMKM. Hal ini mengakibatkan berbagai program pengembangan UMKM terkesan berjalan sendiri-sendiri dan tidak beriringan dengan sektor logistik. Padahal, idelanya untuk mengembangkan sektor UMKM ini, sektor logistik dapat dioptimalkan pula, utamanya dalam hal distribusi dan pemasaran produk-produk UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta masih menemui berbagai kendala dalam distribusi dan pemasaran produk. Hal ini dikarenakan produk-produk UMKM seringkali tidak mendapatkan tempat di pasar ritel modern. Mayoritas pasar ritel modern menolak

produk UMKM dikarenakan belum memiliki ijin usaha maupun ijin produk.

Di sisi lain, pendampingan UMKM yang dilakukan pemerintah setempat juga belum optimal. Hal ini terlihat dari sejumlah 43.804 UMKM di Kota Surakarta, hanya sebanyak 2.978 usaha saja yang sudah menjadi UMKM Binaan. Hal ini menunjukkan masih terdapat sekitar 93 % UMKM yang belum tersentuh oleh pemerintah.

Sektor logistik, utamanya perusahaan jasa ekspedisi belum terlalu bersinergi dengan baik mendukung perkembangan UMKM di Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa perusahaan jasa ekspedisi yang ada, baru terlihat sinergi yang baik antara perusahaan ekspedisi dengan UMKM yang dilakukan oleh PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE). Beberapa program JNE yang dikembangkan dalam mendukung UMKM, semisal : *MyJNE*, *PESONA*, *JNE International Shipment*, *Friendly Logistic*, *JNE Trucking*, dan lain sebagainya

Saran

Berdasarkan penelitian ini, maka dapat diambil rekomendasi terkait penguatan sektor logistik dalam distribusi dan pemasaran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Surakarta, yaitu melalui penguatan sinergi antara perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi pengiriman barang dengan

pengusaha atau pelaku UMKM. Sinergi ini dapat dilakukan dengan kerja sama antara kedua belah pihak, sehingga keduanya sama-sama menguntungkan satu sama lain.

Perusahaan di bidang ekspedisi idealnya dapat diuntungkan dalam jasa pengiriman barang, sedangkan pengusaha UMKM juga diuntungkan dalam pendistribusian dan pemasaran produk-produk UMKM. Oleh karena itu, rekomendasi yang disarankan dari penelitian ini yaitu perlunya regulasi khusus dari pemerintah setempat yang mengatur kerja sama antara sektor UMKM dengan sektor logistik, utamanya perusahaan jasa ekspedisi barang. Hal ini menjadi penting, dimana kegiatan logistik dapat difungsikan lebih optimal dalam pendistribusian dan pemasaran produk-produk UMKM.

Implikasi dan Keterbatasan

Penelitian lanjutan dari riset ini dapat dianalisis dari sudut pandang perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi barang, sehingga akan dapat diperoleh riset yang komperhensif dalam mengkaji permasalahan ini. Perlu kajian lebih lanjut terkait peran perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi barang dalam kaitannya dengan pendistribusian dan pemasaran produk UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Amin Dwi dan Dwi Susilowati. 2017. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*. Vol X Jilid X/Tahun 2017. Hal. 120 – 142.
- Ariani dan Mohamad Nur Utomo. 2017. Kajian Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118.
- Devins, David, Jeff Gold, Steve Johnson, and Rick Holden. (2005). A Conceptual Model of Management Learning in Micro Business : Implications for Research and Policy. *Education + Training*, Vol 47, Issue 8/9, pp.540-551.
- Elogistikred. 2017. E-Commerce, JNE Solo Dorong UKM Sragen Go Online. 8 Mei 2017. Diakses dari : <http://elogistik.id/2017/05/08/e-commerce-jne-solo-dorong-ukm-sragen-go-online/>, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 8.19 pm.
- Fajar, Mukti. (2016). *UMKM di Indonesia (Perspektif Hukum Ekonomi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Greendbank, Paul. (2001). Objective Setting in the Micro-Business. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, Vol.7 Issue 3, pp.108-127.
- Hidayat, Wahid Anggih. (2013). “Pembinaan UMKM Kota Surakarta oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta”. *Skripsi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret*. Tidak diterbitkan.
- Kartika, Desta Laila. 2019. *Tribunnews*, 2 Oktober 2019. Friendly Logistic, Solusi Baru dari JNE untuk Pelaku Industri Kreatif, Diakses dari : <https://jateng.tribunnews.com/2019/10/02/friendly-logistic-solusi-baru-dari-jne-untuk-pelaku-industri-kreatif>, tanggal 4 Oktober 2019, pukul 8.36 p.m.
- Munizu, M. 2013. Strategi Peningkatan Kinerja dan Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Pengolah Produk Berbasis Pangan di Kota Makassar. *Jurnal Ubaya Repository Universitas Hasanudin*[Internet]. [diunduh 2016 Nov 7]; Tersedia pada: <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4299>.
- Solopos. 2018. JNE Tawarkan Layanan Logistik Bagi UMKM Kreatif Jateng. 30 Agustus 2018. Diakses dari : <https://www.solopos.com/jne-tawarkan-layanan-logistik-bagi-umkm-kreatif-jateng-936854>, diakses tanggal 4 Oktober 2019, pukul 8.04 pm.
- Sriyana, Jaka. (2010). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi kasus di Kabupaten Bantul, *Simposium nasional 2010: Menuju Purworejo Dinamis dan Kreatif*.
- Trisnojuwono, Adi; Aida Vitayala S. Hubeis; dan Eko Ruddy Cahyadi. 2017. *Manajemen IKM*, Vol. 12 No. 2, September 2017 (178-186).